Prisma

Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi

Masyarakat Terbuka Indonesia

Pesona atau Persoalan?

LP3ES

Rp 30.000,00

ISSN 0301-6269

9 770301 626001

1

Volume 30, 2011

Masyarakat Terbuka Indonesia
Pesona atau Persoalan?
Vol. 30, No. 1, 2011

Prisma diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah pembangunan ekonomi, perkembangan sosial dan perubahan kultural di Indonesia dan sekitarnya. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, sarjana, praktisi dan pemuda Indonesia yang berbakat untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tulisan dalam Prisma tidak selalu segaris atau mencerminkan pendapat LP3ES. Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.
Dilarang mengutip, menerjemahkan, dan memperbanyak, kecuali dengan izin tertulis dari Redaksi.
© Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Terbit empat nomor dalam setahun

TOPIK KITA

Daniel Dhakidae 2 Keterbukaan, Kekerasan, dan Ketertutupan

Karlina Supelli 3 Masyarakat Terbuka: Catatan Kritis untuk Pesona Sebuah Konsep

Rocky Gerung 15 Komunitarianisme versus Hak Asasi Manusia

Ifdhal Kasim 26 Berakhirnya "Surga" Penegakan Hukum: Refleksi Hak Asasi Manusia Pasca-Orde Baru

Luthfi Assyaukanie 38 Tantangan Kebebasan Bepikir dan Berekspresi di Indonesia

R Kristiawan 45 Jerat Negara dan Pasar dalam Ruang Publik

Marco Kusumawijaya & Mujtaba Hamdi 58 Merawat Khalayak dan Ruang Khalayak

ESAI

Daniel Dhakidae 22 Kekisruhan Semantik: Sumber Keruwetan Politik Kewarganegaraan

DIALOG

Goenawan Mohamad 69 Ambiguitas Masyarakat Terbuka

SURVEI

Tanti Budi Suryani & Ahmad Faisol 76 Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di Nusa Tenggara Timur

BUKU

Kasdin Sihotang 90 Pendidikan Multikultural untuk Masyarakat Terbuka

101 PARA PENULIS

Diterbitkan atas kerja sama dengan Yayasan Tifa
Gambar oleh GM Sudarta

Prisma* Vol. 30, No. 2: *Kesusastraan
Prisma* Vol. 30, No. 3: *Pemuda

Pendiri: Ismid Hadad, Nono Anwar Makarim • **Pemimpin Umum**: Suhardi Suryadi • **Wakil Pemimpin Umum**: Sudar Dwi Atmanto • **Pemimpin Redaksi**: Daniel Dhakidae • **Redaktur Pelaksana**: MA Satyasuryawan • **Dewan Redaksi**: A Tony Prasetiantono, Azyumardi Azra, Jaleswari Pramodhawardani, Kamala Chandrakirana, Sumit Mandal (Jerman), Taufik Abdullah, Vedi R Hadiz (Australia) • **Redaksi**: Daniel Dhakidae, E Dwi Arya Wisesa, MA Satyasuryawan, Nezar Patria, Rahadi T Wiratama **Sekretaris Redaksi**: Eriko Sustia • **Produksi**: Awan Dewangga

Alamat: Jalan Letjen S Parman 81, Jakarta 11420, Indonesia. Tlp.: (6221) 567 4211, Faks.: 568 3785
Email: prisma.redaksi@lp3es.or.id; prisma.redaksi@gmail.com; Website: www.lp3es.or.id
Bank: MANDIRI, KCP RSKD, Jakarta. Nomor Rekening: **116-000-526-169-9** a/n LP3ES

Masyarakat Terbuka

Catatan Kritis untuk Pesona Sebuah Konsep*

Karlina Supelli

Banyak upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama di negeri ini mandek karena kita tidak cukup kritis terhadap dogmatisme yang hendak menyingkirkan semua argumen rasional tentang bagaimana merawat bangsa. "Masyarakat terbuka" adalah sebuah gerak pencarian cita-cita berlandaskan rasionalisme kritis. Bagaimana kita membaca hal ideal itu dalam konteks keindonesiaan yang penuh dengan irasionalitas dan "kebebasan" yang lebih banyak ditentukan oleh "fundamentalisme pasar"? Kondisi yang sekarang menjerat kita adalah ultraliberal atomis dan atomistik yang sesekali ditabrak oleh kekuatan-kekuatan tribal sektarian dalam bentuk sektarianisme agama, etnis, dan sebagainya.

Cuaca politik Indonesia sepanjang sepuluh tahun terakhir mungkin membuat gagasan "masyarakat terbuka" yang diusulkan Karl Raymund Popper tampak terlalu polos. Dia membayangkan kebijakan-kebijakan pemerintah senantiasa bersifat hipotetis layaknya teori-teori ilmiah. Jika terbukti keliru atau mengandung kelemahan, kebijakan akan diganti atau mengalami modifikasi. Popper membayangkan kebebasan berpendapat menjadi alat untuk menemukan kesalahan dan bukan selubung yang menyembunyikan kebenaran. Dia membayangkan pemerintah yang demokratis melindungi masyarakat terbuka sehingga tidak ada penindasan terhadap satu kelompok oleh kelompok lainnya. Popper tentu cukup cermat mencatat bahwa demokrasi "tidak pernah dapat menciptakan kebebasan kalau warga sendiri tidak peduli".[1]

Banyak upaya untuk menjelmakan kebaikan bersama di negeri ini mengalami kemacetan karena ketidakpedulian kita terhadap cita-cita bersama. Kita juga tidak cukup kritis terhadap dogmatisme yang dengan ganas mau menyingkirkan semua argumen rasional tentang bagaimana merawat bangsa. Semua gejala itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Banyak urusan mengelola hidup bersama terkatung-katung terutama karena politik berjalan sebagai operasi persekongkolan memperebutkan apa saja yang bisa dijarah. Politik melaju tanpa

---

* Artikel ini merupakan pengembangan dari kuliah publik yang disampaikan dalam peringatan "10 Tahun Yayasan Tifa", Jakarta, 8 Desember 2010.

[1] Mengutip Mark Notturno, "The Open Society and Its Enemies: Authority, Community, and Bureaucracy", dalam Ian Javier dan Sandra Pralong (*eds.*), *Popper's Open Society After Fifty Years* (London: Routledge, 1999), hal. 47.

disertai agenda untuk sedikitnya *choosing the lesser evil*.[2]

Tulisan ini secara sangat terbatas mencoba memaparkan corak masyarakat terbuka dan lawan-lawannya tanpa secara rinci menelusuri "musuh-musuh" yang didaftar oleh Popper maupun spekulasi sosio-biologi Henri Bergson, orang yang kali pertama menggunakan istilah "masyarakat terbuka" dan "masyarakat tertutup".[3] Popper menggunakan istilah itu secara berbeda, tetapi keduanya — Bergson dan Popper — percaya bahwa masyarakat terbuka adalah cita-cita yang layak diperjuangkan. Ini melahirkan pertanyaan apakah masyarakat politik yang baik perlu mengambil bentuk masyarakat terbuka? Jika jawabannya positif, dalam kaitan dengan Indonesia, pertanyaan itu dapat dirumuskan menjadi lebih pragmatik: apakah suasana yang kita hidupi sekarang menyediakan prasyarat bagi lahirnya masyarakat terbuka?

Masyarakat Tertutup

Konsep Bergson tentang masyarakat terbuka terkait dengan sumber moralitas dan jenis agama yang tumbuh di dalamnya. Analisis Bergson yang diawali dengan pertanyaan "mengapa kita patuh?" berujung pada kesimpulan bahwa rasa merasa berkewajiban mengakar di masalah biologis manusia untuk bertahan dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat mengatur kewajiban warganya sampai ke hal-hal sepele sehingga, bagi Bergson, pengandaian bahwa orang taat menjalankan kewajiban moral karena pertimbangan rasional tidaklah masuk akal. Juga seandainya orang menimbang-nimbang kaidah moral yang akan dipatuhi, nalar sekadar melayani dorongan purba itu. "Ego sosial" yang membuat orang patuh tidak selalu berhubungan dengan suara hati atau kesadaran moral otonom (*moral conscience*).[4]

Dengan kata lain, rasa berkewajiban berasal dari paksaan sosial dan orang punya kebutuhan untuk mematuhinya. Orang membangun kebiasaan-kebiasaan untuk patuh seperti ia terbiasa sikat gigi atau cuci kaki sebelum tidur. Kendati manusia adalah makhluk bebas, kebiasaan menghasilkan keteraturan mirip mekanisme alam yang kaku, sehingga orang bahkan tidak lagi memikirkan atau perlu mengeluarkan usaha untuk menjalankannya. "Semua bersekongkol untuk membuat kita percaya bahwa keteraturan itu bersifat alami".[5]

Masyarakat apakah yang memaksakan kewajiban-kewajiban kepada anggotanya? Pertanyaan itu mengarahkan Bergson ke pembedaan antara masyarakat tertutup yang melibatkan hanya kelompok tertentu dan masyarakat terbuka yang diwakili oleh seluruh umat manusia.[6] Masyarakat tertutup mempertahankan eksistensinya melalui ketaatan mutlak. Di dalamnya terdapat jejaring kewajiban yang saling mengikat untuk menyatukan anggota. Rasa merasa dipelihara agar anggota selalu merasa merupakan bagian dari kesatuan itu. Moralitas dasarnya adalah moralitas perintah yang tidak mengizinkan orang mempertanyakan kode-kode sosial yang berlaku. Di bawah moralitas semacam itu, manusia diciptakan untuk masyarakat seperti semut diciptakan bagi kawanan semut. Anggotanya sibuk berputar dalam batas-batas lingkaran komunitasnya sendiri, mereka "tidak peduli dengan umat manusia di luar".[7]

---

[2] Saya meminjam ucapan Karl Kraus yang dikutip Karl Popper dalam *The Open Society and Its Enemies, Volume II, The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and the Aftermath* (London: Routledge [1945/1993]), hal. 334.

[3] Bergson menggunakan istilah ini dalam buku *The Two Sources of Morality and Religion* yang diterjemahkan R Ashley Audra dan C Brereton (Notre Dame IN: University of Notre Dame Press [1932/1977]). Popper juga mencatat bahwa "*open society*" dan "*closed society*" digunakan kali pertama oleh Bergson; lihat, Karl Popper, *The Open Society and Its Enemies, Volume I, Plato* (London: Routledge, 1945/1966), hal. 202.

[4] Bergson, *Two Sources*..., hal. 16.

[5] Bergson, *Two Sources*..., hal. 11, 19.

[6] Bergson, *Two Sources*..., hal. 20.

[7] Bergson, *Two Sources*..., hal. 265.

Dalam analisis Bergson, masyarakat jenis itu hanya dapat hidup, berkomunikasi, dan melanggengkan kebiasaannya melalui kinerja agama statik. Agama statik tidak sama dengan moralitas yang melandasi masyarakat tertutup, dalam arti bahwa bisa saja agama statik menjalankan laku religius yang dikecam oleh masyarakat tertutup. Akan tetapi, keduanya melayani tata sosial yang sama dan sering kali berimpitan. Agama statik memanfaatkan fungsi fabulasi, yakni daya-daya fantasi untuk menciptakan mitos yang menjelaskan peristiwa-peristiwa mencekam atau membingungkan. Fungsi ini juga menekan hasrat individu yang menyimpang dari norma komunitasnya dengan menciptakan rasa takut atau rasa terkucil. Dalam masyarakat kuno ada dewa-dewa yang suka murka kepada manusia. Sekarang, insting itu tampaknya menghadirkan Tuhan yang mengguncang Bumi untuk melaknat orang-orang berdosa.

Berdasarkan penafsiran yang sahih menurut mereka sendiri, penganut agama statik menciutkan gejala-gejala sosial yang rumit ke urusan berkah atau kutuk, pahala atau dosa. Karena unsur paling pokok yang menyatukan masyarakat tertutup adalah kebutuhan mempertahankan tradisi dan konvensi, maka mereka senantiasa curiga dan bersiaga menyerang apa pun yang dianggap sebagai ancaman yang akan meluruhkan kesatuannya. Sesama masyarakat tertutup bisa saling serang dengan alasan membela "Tuhan semesta alam". Padahal, tuhan yang mereka bela adalah "tuhan nasional agama statik".[8]

Masyarakat Umat Manusia

Bergson mengkritik filsafat moral yang tidak menaruh perhatian pada muasal moralitas sehingga begitu saja mengandaikan bahwa tuntutan paling dasar dalam kehidupan sosial adalah kewajiban hormat terhadap kehidupan dan hak milik orang lain. Kritik Bergson mau menunjukkan bahwa betapa pun maju sebuah sistem politik, sistem itu ada untuk melindungi dan memajukan kepentingan tertentu dan bukan kemanusiaan secara umum. Dia memberi contoh bagaimana dalam relasi internasional yang mengumandangkan perdamaian, selalu ada pembedaan radikal antara kewajiban manusia terhadap sesama manusia dan kewajiban terhadap sesama warga negara. Begitu terjadi perang, saling bunuh, saling rampas, dan saling khianat tidak saja ditetapkan sebagai strategi tetapi juga strategi yang layak dipuji.

Inilah alasan mengapa Bergson menyindir kenaifan cara pikir yang mengandaikan bahwa melalui cinta kepada keluarga, orang dapat dididik untuk mencintai negara dan kemanusiaan. Perasaan manusia seolah-olah dapat diperluas sejajar dengan bertambahnya jumlah objek yang dicintai manusia. Padahal,

> antara negara, seberapa pun luasnya negara itu, dan kemanusiaan ada jarak dari yang terbatas ke yang tak terbatas, dari yang tertutup ke yang terbuka. Kita senang mengatakan bahwa dalam keluargalah kita berlatih tentang keutamaan sebagai warga negara (*civic virtue*), dan dengan cara yang sama kita mencintai umat manusia untuk cinta kepada negara. Seolah-olah simpati kita terus meluas tanpa terputus, terus bertambah tanpa berubah, dan berakhir dalam rangkulan kita terhadap kemanusiaan.[9]

Ada dua pokok penting mengemuka dari teori politik evolusionisme Bergson. *Pertama*, masyarakat terbuka bukan fakta. Masyarakat terbuka adalah cita-cita, suatu konsep global yang mau mencakup setiap manusia yang hidup, sekaligus merupakan konsep temporal karena perlu upaya berkesinambungan untuk mewujudkannya.[10] Mungkin karena sadar bahwa konsep masyarakat terbuka terlalu ideal, Bergson mengajukan kategori yang ketiga,

---

[8] Bergson, *Two Sources*..., hal. 215.

[9] Bergson, *Two Sources*..., hal. 31-32.

[10] Bandingkan, Dante Geronimo, "Henri Bergson: Activist Mysticism and The Open Society", dalam *The Political Science Reviewer*, VIII (Musim Gugur, 1978), hal. 4.

yaitu masyarakat dalam perjalanan menjadi terbuka.

Kedua, kepercayaan berlebih pada nalar tidak akan menyelesaikan kekerasan. Butir kedua ini membawa kita ke spekulasi Bergson tentang "lompatan" menuju masyarakat terbuka. Istilah "lompatan" menjadi penting karena titik berangkat Bergson adalah intuisi. Masyarakat terbuka ditandainya dengan cinta pada kemanusiaan dan untuk itu diperlukan moralitas yang berbeda, yang bukan kelanjutan ataupun pengembangan moralitas tertutup.

Kinerja masyarakat terbuka tidak mengandalkan rasa merasa berkewajiban. Moralitasnya bersumber di aspirasi serta emosi kreatif manusia. Karena mengakar di energi kreatif, masyarakat terbuka tidak membuang-buang sumber dayanya demi melanggengkan kohesi, tetapi memanfaatkannya untuk perubahan dan kemajuan. Masyarakat terbuka juga tidak mungkin tercapai dalam tekanan kinerja agama statik. Agama yang mendukung relasi-relasi dalam masyarakat terbuka tidak mengikat diri secara kaku ke lembaga, doktrin serta ritual keagamaan. Agama itu bersifat dinamik, cair, personal, dan tercapai melalui laku mistik yang menggabungkan aksi dan kontemplasi.

Bergson memang sedikit terlalu optimistik ketika menyejajarkan mistisisme, *homo faber* (makhluk pekerja), serta proses industrialisasi dengan masyarakat terbuka dan agama dinamis. Dia menaruh kepercayaan besar pada teknologi asalkan teknologi memenuhi tujuan yang sejati, yaitu membebaskan manusia. Untuk itu, pengembangan dan penerapan teknologi perlu ditangani organisasi politik dan sosial tunggal yang mungkin dibayangkankanya mirip perserikatan atau liga bangsa-bangsa.

Pada titik itulah Karl Popper mengkritik Bergson,[11] karena mengandaikan bahwa lompatan intuisi dan mistik adalah satu-satunya jalan bagi perubahan radikal dalam masyarakat. Popper juga sempat menyebut Bergson menawarkan pemikiran yang berbahaya karena mengembalikan politik ke intuisi dan emosi. Popper sendiri menafsirkan mistisisme sebagai reaksi masyarakat tertutup yang gentar menghadapi perubahan sosial sehingga perlu membangun mimpi tentang realitas tribal (kesukuan) yang terpadu dan tak berubah. Dengan kata lain, bagi Popper, mistisisme adalah tindakan yang diarahkan justru untuk melawan rasionalisme masyarakat terbuka.

Perlu dicermati, Bergson sebetulnya tidak menawarkan mistik yang menjauhi dunia sebagaimana tafsiran Popper. Mistik yang utuh memandang tugas manusia adalah untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan diawali Tuhan dalam penciptaan. Bagi Bergson, pengalaman mistik sejati tidak semata-mata berisi kontemplasi akan Tuhan, melainkan juga melibatkan aksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dunia adalah situs tempat "manusia yang men(t)uhan".[12]

Ironisnya, pemikiran Bergson tentang energi kreatif dan intuisi menjadi slogan fasisme di Italia dan Jerman, terutama sesudah melalui tafsiran Georges Sorel yang dikenal sebagai bapak intelektual fasisme Perancis. Sorel menafsirkan intuisi model Bergson sebagai sarana untuk mensahihkan irasionalitas politik, khususnya dalam bentuk tindakan-tindakan revolusioner spontan. Dia juga menggunakan konsep energi kreatif Bergson untuk menjustifikasi kekerasan dalam politik, sampai-sampai Julien Benda yakin bahwa filsafat spekulatif Bergson sungguh-sungguh mendorong ketidakstabilan sosial melulu melalui daya irasional yang buta.[13]

---

[11] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. I, hal. 202.

[12] Bergson, *Two Sources...*, hal. 200-201.

[13] Ellen Kennedy, "Bergson's Philosophy and French Political Doctrines: Sorel, Maurras, Peguy and De Gaulle", dalam *Government and Opposition*, Vol. 15, No. 1 (1980), hal. 77-78. Kekeliruan penafsiran Sorel diuraikan Allan James Thomas: "Fascism, Irrationality, and Creative Evolution or Deleuze, Running Away", dalam *Bulletin de la Sociiti Amiricaine de Philosophie de Langue Franfaise*, Vol. XV, No. 2 (Musim Gugur 2005).

Bergson menilai fasisme sebagai contoh paling nyata untuk melengkapi argumen-argumennya tentang bahaya masyarakat tertutup. Seluruh ide Bergson tentang masyarakat terbuka bertumpu di atas mimpi romantis tentang segelintir orang terpilih atau bahkan seorang manusia superjenius dan superkreatif yang dengan daya mistiknya akan memimpin perubahan politik dan lompatan kebudayaan. Masalahnya, sejauh mana orang atau kelompok terpilih itu di ujung hari tidak memperanakkan fasisme, imperialisme, atau dogmatisme?

Ruang Publik bagi Perbedaan

Masyarakat terbuka model Popper adalah masyarakat warga yang mengandalkan ruang publik. Ruang publik tersebut menjamin kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pemikiran dan keyakinannya, dan memungkinkan daya kritis manusia mengemuka dengan bebas. Konsepnya berasal dari logika sains yang melandasi filsafat ilmu Popper dan mengandaikan masyarakat sanggup menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan "pikiran jernih dan pengalaman ketimbang emosi dan hasrat",[14] serta bersedia mengakui bahwa setiap gagasan, pengetahuan, dan keyakinan bisa salah.[15] Dengan sikap itu, perbedaan bukanlah momok yang perlu ditindas, tetapi ruh yang menghidupkan ruang publik. Kolektivisme "kawanan hewan" yang menuntut warga berelasi, bertindak, dan merasa dengan cara yang sama adalah musuh masyarakat terbuka. Musuh-musuh lain yang didaftar Popper adalah fasisme dan komunisme, serta dalam bentuk lebih baru dan tersebar di dunia adalah rezim fasis-klerik, rezim korup, rezim militer-diktator, dan nasionalisme militan.[16]

Popper gigih membela sikap kritis dan rasionalisme karena dalam politik konsekuensi irasionalisme melampaui urusan benar atau salah. Irasionalisme membawa konsekuensi moral dan kriminal yang mengerikan. Sikap irasional menganggap argumen orang lain tidak relevan. Dalam politik ini bisa berarti hak dan kebutuhan orang lain tidak relevan. Irasionalisme dalam kekuasaan akan membenarkan diskriminasi, kekerasan dan pembunuhan berdasarkan suku, kelas, ras, maupun agama.[17] Kendati argumen-argumen rasional tidak menjamin sampai ke ide yang lebih baik, rasionalisme sedikitnya akan membatasi pemutlakan ide. Rasionalisme mengikat kita ke gagasan "orang lain berhak untuk didengar dan mempertahankan argumen".[18] Ringkasnya, itulah sikap yang mau mengakui bahwa "saya mungkin salah dan Anda mungkin benar, dan melalui sebuah upaya kita boleh jadi semakin dekat pada kebenaran".[19] Bagi Popper, inilah sikap masuk akal yang dipercayainya dapat menjamin toleransi. Kalau saja orang mau mulai dengan mendengarkan, tentu dia tidak akan mulai dengan membunuh. Rasionalisme kritis inilah yang merupakan landasan masyarakat terbuka.

Cuaca Ke-Indonesia-an Kita

Masyarakat terbuka, tentu saja, adalah masyarakat pada tataran normatif.[20] Pada dasarnya, semua masyarakat politik tanpa kecuali adalah

---

[14] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. II, hal. 248-249.

[15] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. II, hal. 249.

[16] "Introduction", dalam Javier dan Pralong, *Popper's Open Society*..., hal. 8. Pendekatan Popper dalam *The Open Society* membuat Gellner konon berkomentar judul paling tepat untuk buku ini adalah "The Open Society by one of its Enemies"; lihat, Notturno dalam Javier dan Pralong, *Popper's Open Society*..., hal. 42.

[17] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. II, hal. 235-236. Untuk bisa bersikap rasional, orang perlu terlebih dahulu, sadar maupun tidak, memilih secara irasional untuk percaya terhadap nalar: Popper, *The Open Society* .... hal. 230-231.

[18] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. II, hal. 263.

[19] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. II, hal. 249.

[20] Sebagaimana konsepsi Bergson, masyarakat terbuka Popper juga merupakan tipe ideal. Dalam

masyarakat tertutup. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa prinsip-prinsip masyarakat terbuka melulu bersifat abstrak. Pertanyaannya, di bawah cuaca keindonesiaan sekarang, bagaimana kita membaca yang ideal itu dalam kemungkinan dan ketidakmungkinannya?

Meski tidak dapat diciutkan melulu ke dikotomi rasionalisme dan irasionalisme, masyarakat terbuka dan tertutup, maupun agama statis dan dinamis, apa yang kita alami sepanjang satu dasawarsa belakangan ini sedikitnya memberi gambaran seberapa besar kadar irasionalitas, ketertutupan, dan *kemandekan* yang membuat urusan hidup sehari-hari warga kebanyakan makin terbengkalai. Setidaknya ada beberapa gejala yang dapat dikemukakan di sini.

Pertama, menyangkut tribalisme politik sektarian yang semakin luas dan ganas. Inilah politik yang menolak semua argumen kecuali yang diyakini berasal dari Tuhan. Para penganutnya tentu tidak peduli dengan argumen Popper bahwa "apa pun otoritas yang kita terima, adalah kita yang menerimanya".[21] Argumen ini menunjuk pada otonomi moral. Artinya, dari mana pun suatu perintah berasal, begitu kita menerima dan mematuhinya, kita sendiri yang bertanggung jawab, apalagi jika perintah itu didaku seolah-olah manusia tahu semua apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menjadi ontologi (Sang Ada) yang dipertaruhkan melalui berbagai epistemologi (laku mengetahui) dan aksiologi (laku menilai). Padahal laku mengetahui mengandaikan ciri antropologis semua bentuk pengetahuan. Popper merumuskannya dengan sederhana, "semua pengetahuan bisa salah".

Masalahnya, tiang penyangga tribalisme sektarian adalah monisme naif yang tidak sanggup memilah yang ilahi dari yang alami dan yang konvensi. Sedemikian rupa, sehingga apa yang tampaknya terjadi adalah kecenderungan pemutlakan yang mengarah pada dogmatisasi pengetahuan-penafsiran melalui penyingkiran ciri antropologis yang intrinsik pada *actus* mengetahui itu sendiri. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat pada jerih payah untuk membangun dialog toleransi, saya berpendapat bahwa upaya tersebut tetap akan membentur pintu tertutup selama ciri antropologis itu tidak kita pahami secara memadai.

Mengapa? Karena cuaca kultural yang mengancam keindonesiaan yang terbuka dan toleran tampaknya bukan melulu bersumber di masalah intoleransi tribal moralitas tertutup. Di balik intoleransi itu terletak pertanyaan-pertanyaan rumit yang sepanjang zaman membayang-bayangi umat beragama: seberapa jauhkah jarak hubungan antara kata tentang Tuhan dan Tuhan? Karena kita tidak sanggup mengukur yang tak terjangkau, kita terpaksa mengalihkan pertanyaan itu: bagaimanakah kita dapat memberi makna jarak antara laku mengetahui-menafsirkan dan Sang Ada yang hakikatnya melampaui batas nalar dan akal-budi? Konkretnya, bagaimanakah kita membaca jarak yang terentang antara cara kita memahami dan peristiwa-peristiwa wahyu?

Pertanyaan itu mungkin memaksa kita melepas hasrat untuk menemukan konvergensi penafsiran yang bisa diterima secara universal. Dalam keanekaragaman pengalaman manusia, mungkin kita memang hanya bisa mengupayakan koherensi narasi. Upaya itu menuntut kita

---

praktik, tidak akan pernah ada masyarakat yang sepenuhnya rasional dan terbuka. Popper sendiri membayangkan masyarakat yang terbuka penuh pada akhirnya melahirkan masyarakat abstrak atau *depersonalized society* yang kehilangan corak konkret komunitas; Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. I, hal. 174. Kita berpapasan dengan puluhan orang setiap hari, namun kita tidak berkomunikasi dengan satu orang pun. Kita menjadi anggota bermacam kelompok, tetapi hanya sebatas punya kartu anggota dan bayar iuran bulanan; *cf.* Dante Germino, "Karl Popper's Open Society", dalam *The Political Science Reviewer*, VIII (Musim Gugur, 1978), hal. 21-61.

[21] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. I, hal. 73.

berjaga dengan nalar yang ketat.[22] Tanpa keketatan nalar dengan mudah kita tergelincir ke permainan kata yang ujungnya persis adalah kutub lain yang tidak kalah menakutkan ketimbang dogmatisasi pengetahuan, yaitu relativisme epistemologis. Kebenaran selalu hanya relatif terhadap kelompok dan budaya tertentu, ideologi dan agama tertentu, serta terhadap pilihan hidup tertentu. Relativisme epistemologis memandang seseorang seakan-akan tidak sanggup membangun kerangka penilaian yang melampaui kerangka penilaian masyarakatnya.

Kedua, terlalu naif kalau kita mengandaikan bahwa upaya menyelamatkan Indonesia dapat kita serahkan melulu kepada pemerintah. Peran pemerintah semakin tergeser karena begitu banyak kepentingan menjerat otoritasnya untuk mengelola Indonesia. Reformasi memang membuka peluang bagi terbentuknya masyarakat warga. Masalahnya, warga kian tergiring menjadi konsumen. Ketika warga negara (dengan hak dan kewajiban politik) beralih menjadi konsumen (dengan prinsip daya-beli), kebebasan yang amat kita damba ternyata batal oleh hukum pertukaran dan jual beli. Pasar tentu akan mengagungkan "kebebasan". Namun, kebebasan seperti apa yang ditawarkan oleh pasar? Barangkali beberapa contoh berikut terkesan terlalu ekstrem, meski sebetulnya merupakan peristiwa yang semakin lumrah.

Sejak reformasi, kita giat memperjuangkan kebebasan berpendapat. Masalah yang menghadang muncul bukan dari pemerintah yang mendaku sudah menjalankan pemerintahan yang demokratis. Masalah bersumber pada terbatasnya akses ke pendidikan yang baik, yang pada gilirannya membentuk kesanggupan kita untuk merumuskan pendapat dengan cerdas dan keberanian mengemukakannya dengan bebas. Kita tahu kualitas pendidikan bergantung sepenuhnya pada seberapa tebal pundi-pundi yang kita punya. Kemampuan belajar pun tidak dapat dilepaskan dari kualitas kesehatan. Kita memang punya undang-undang yang menjamin setiap warga negara untuk hidup sehat. Masalahnya, kebebasan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik juga tidak tersedia kecuali kantong kita cukup gemuk.

Saya teringat Pak Tukirin, petani sederhana di Nganjuk. Sebagai warga negara Indonesia, dia punya hak untuk bekerja dan punya kebebasan untuk memilih pekerjaan. Pak Tukirin pernah ikut kegiatan penyilangan benih jagung yang merupakan proyek kerja sama pemerintah daerah Nganjuk dengan sebuah perusahaan multinasional. Seluruh benih hasil penyilangan harus dijual ke perusahaan itu. Jika mau menanam jagung, Pak Tukirin harus membeli kembali benih silangannya sendiri. Sesudah proyek selesai, Pak Tukirin ingat bahwa dia menyimpan benih-benih gagal yang ditolak perusahaan. Dia mencoba menyilangkan benih gagal itu dan ternyata menghasilkan bibit unggul. Rekan-rekan petani tentu bersukacita. Mereka bisa membeli benih murah. Pak Tukirin juga membagi pengetahuannya. Itulah saat Pak Tukirin didatangi polisi dan digiring ke pengadilan. Ketika terbukti tidak mencuri, tuduhan dialihkan ke pelanggaran peniruan budidaya, padahal Pak Tukirin mengembangkan metode penyilangan yang berbeda.[23]

Demikian brutalitas pertarungan kebebasan ketika ia jatuh ke dalam materialitas gejala sehari-hari. Sebaliknya, totalisasi hampir seluruh aspek kehidupan ke bawah prinsip daya beli berlangsung sedemikian halus, sehingga kita terbius di bawah iklan yang gemerlap. Bahwa pasar semakin menjadi penentu jatuh

[22] Bagian tentang ciri antropologis pengetahuan ini diambil dari bahan kuliah terbuka Karlina Supelli, "Ciri Antropologis Pengetahuan", dalam *Nurcholis Madjid Memorial Lecture* yang disampaikan di Universitas Paramadina, Jakarta, 28 Oktober 2010.

[23] Lihat, Ridho Saiful Ashadi, "Imperialisme Benih di Ladang Jagung", artikel diunduh dari http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/indonesia/20-mengembalikan-kedaulatan-petani-atas-benih/imperialisme-benih-di-ladang-jagung/at_download/article_pdf.

TOPIK

bangun hidup sehari-hari warga kebanyakan adalah konsekuensi logis dari pilihan serampangan kita. Kita membiarkan pasar membentuk hasrat-hasrat kita.

Di manakah letak masalah kita? Masyarakat warga yang kita cita-citakan barangkali terlalu sibuk merancang demokratisasi, tetapi melupakan sejarah kelahirannya. Demokrasi punya sejarah panjang. Namun, demokrasi modern bertumpu di atas pengalaman mereka yang paling tertindas oleh watak otoriter kekuasaan, dan mereka tentu bukan pemilik uang maupun pemangku kekuasaan yang jumlahnya segelintir. Mereka adalah rakyat kebanyakan seperti Pak Tukirin. Dari situ turun pengandaian yang masuk akal. Benih demokrasi tumbuh dalam prinsip bahwa keputusan yang menyangkut jatuh bangun pemenuhan kebutuhan pokok yang menyangga kehidupan bersama hanya sahih jika bertumpu di atas kondisi hidup-mati rakyat biasa yang paling rentan terhadap dampak keputusan itu.

Ketika pasar tumbuh bebas tanpa regulasi, itulah saat kebebasan meminum racunnya sendiri. Inilah saat kebebasan tak terkendali memungkinkan pihak yang kuat bebas menindas dan merampas kebebasan yang lemah. Pihak yang berkelebihan dapat memaksa yang berkekurangan untuk seolah-olah "dengan bebas" menyetujui kontrak yang sebetulnya dibuat secara sepihak.[24]

Ketiga, kita berharap media berperan besar dalam mendorong terbentuknya ruang publik. Masalahnya, seperti kebanyakan di antara kita, media juga gagap menghadapi kencangnya laju teknologi informasi. Teknologi ini memungkinkan "informasi sebagai realitas" alias realitas rekaan yang menggilas "informasi tentang dan untuk realitas".[25] Ketika daya untuk mencerna peristiwa kian lemah, citra menjadi lebih penting ketimbang peristiwa nyata. Hal yang durjana dan ganas kita giring ke layar *BlackBerry* atau ke ruang tidur dan menjadikannya tontotan di layar televisi. Kita jatuh pada permainan citra dan makna. Apakah yang jahat itu Amerika Serikat atau Irak, apakah yang korup itu partai politik A atau B, tergantung pada saluran televisi yang kita pilih. Ruang publik menjadi arena pertarungan kepentingan politik partai yang bersekutu dengan para pemilik modal.

Gejala itu cukup meluas lantaran semakin banyak orang sekadar terpesona nonton informasi. Mereka takut ketinggalan informasi. Kita lompat dari satu soal ke soal berikut tanpa sempat bertindak atas bahan yang sudah bertumpuk. Melalui gerombolan perilaku yang serampangan itu pula gerak politik kita pada akhirnya berdiri di atas kekosongan yang gaduh. Politik telah menjadi kutu loncat kejadian. Inilah penjara kita: persoalan baru muncul menekan dengan kesan kemendesakan, sebelum urgensi raksasa lama diselesaikan.[26] Politik yang hanya sanggup gaduh tak pernah diam tentu cuma menabuh apa yang tampak di permukaan. Seolah-olah korupsi ditangani, seolah-olah buruh migran dilindungi, seolah-olah hak-hak ekosob dikelola. Semakin tinggi tumpukan "seolah-olah" semakin politik kehilangan alasan adanya, yaitu kapasitas mengubah berbagai tragedi ketidakadilan bagi penciptaan kembali kehidupan bersama.

Adakah jalan keluar dari penjara itu?

Mungkin kita perlu setia pada kejadian. Setia sebagaimana keluarga korban yang setiap

[24] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. II, hal. 125. Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Popper mencatat bahwa kapitalisme tak terkendali menuntut "intervensionisme ekonomi" secara terlembaga dengan catatan pilihan ini berisiko memberi otoritas berlebihan pada pemerintah (negara).

[25] Saya mengacu Borgmann untuk gagasan mengenai informasi ini: *information about reality* (langit mendung pertanda akan hujan), *information for reality* (resep cara membuat roti), dan *information as reality* (bercinta lewat internet); lihat, Albert Borgmann, *Holding On to Reality: The Nature of Information at the Turn of the Millennium* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), terutama Bab I.

[26] Lihat, Karlina Supelli, "Potret Para Korban", dalam *Kompas*, 26 Mei 2010.

hari Kamis sore selama bertahun-tahun berdiri satu jam tanpa bicara sambil membawa atau menggendong potret wajah suami dan anak mereka yang mati dan hilang dalam berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Di atas kejadian yang menimpa korban, mimpi Reformasi menemukan peluang untuk menjadi gerakan. Namun, tanpa kesetiaan pada kejadian dan tanpa kesediaan merawat kemungkinan baru yang pernah muncul dari kejadian itu, politik kembali menjadi operasi tukar tambah kepentingan partai.

Keluarga korban tentu sangat mengerti. Dalam irasionalitas cuaca politik sekarang ini, kesetiaan menghidupkan kejadian tidak menjamin kebenaran akan hadir. Mereka juga tahu. *By default*, korban dan orang miskin dianggap sebagai kelompok yang selalu diam. Akan tetapi, persis karena itu mereka adalah tolok ukur bagi keseriusan politik negeri ini. Para korban ketidakadilan adalah titik berangkat mengapa kita butuh politik, mengapa kita butuh demokrasi, dan mengapa reformasi menuntut tata pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta mengapa reformasi memperjuangkan terbentuknya masyarakat warga yang bebas dalam mengemukakan pendapat. Politik yang tidak mau bersentuhan dengan korban dan dengan solusi bagi ketidakadilan yang mereka tanggung telah kehilangan alasan "adanya".

Kemungkinan Masyarakat Terbuka

Ilustrasi di atas seolah-olah menjauhkan kita secara teoretis dari konsepsi tentang masyarakat terbuka dan secara praktis dari peluang bagi pembentukannya. Dengan pengandaian sederhana bahwa nilai-nilai masyarakat terbuka layak diperjuangkan, beberapa pokok di bawah ini kiranya dapat dikaji untuk menimbang kemungkinan dan ketidakmungkinannya.

Pertama, prinsip pemandu dalam masyarakat terbuka hanya berfungsi dalam tata sosial-politik yang sudah menerapkan kerangka kerja masyarakat terbuka.[27] Prinsip-prinsip tersebut sulit menjadi dasar untuk membangun masyarakat terbuka dari titik nol. Prinsip "bisa salah" mengandaikan prinsip yang lebih mendasar, yaitu "tak seorang pun menimbang diri lebih berharga" karena anggota kelompoknya lebih besar, atau karena dakuan eksklusif apa pun juga. Menerima kedua prinsip itu berarti menerima konsekuensinya, yakni perbedaan gagasan dan keyakinan adalah hal lumrah dalam kehidupan bersama.

Kedua, sebagaimana epistemologinya, prinsip-prinsip masyarakat terbuka adalah metodologi pemecahan masalah. Prinsip-prinsip itu bukan panduan untuk memulai suatu agenda sosial-politik yang sama sekali baru. Sebagai metodologi, tawaran Popper memiliki keterbatasan. Dia menyediakan langkah-langkah cemerlang tentang bagaimana memecahkan masalah, tetapi tidak menjelaskan apa yang secara konkret perlu dijalankan. Kita keliru kalau mengharapkan Popper sang filsuf berbicara kepada kita pada aras pragmatik semacam itu.[28]

Ketiga, pendekatan Popper terutama bukan resep untuk memperjuangkan "kebaikan terbanyak". Popper menyebutnya "rekayasa sedikit-sedikit" (*piece-meal engineering*). Tujuannya adalah memerangi kedurjanaan untuk sedapat

---

[27] Prinsip-prinsip itu antara lain *fallibilism* (bisa salah), meminimumkan kesengsaraan (bukan memaksimalkan kebahagiaan), tak seorang pun boleh menimbang dirinya lebih berharga dari siapa pun juga, dan menghindari utopia dengan pendekatan "sedikit-sedikit" (*piecemeal*).

[28] Untuk masyarakat yang punya kesempatan membangun dari titik awal, misalnya, Timor Leste atau negara-negara pecahan Uni Soviet, pendekatan Popper tidak memberi jawaban bagi pertanyaan konkret menyangkut sistem pendidikan apa yang perlu dibangun, tingkat kesejahteraan macam apa yang sanggup dicapai dan bagaimana mengelolanya, sistem ekonomi apa yang akan dikembangkan dan dari mana sumber dayanya, dan sebagainya; lihat, Bryan Magee, "What Use is Popper to A Practical Politician?", dalam Javier dan Pralong, *Popper's Open Society...*, hal. 154.

mungkin mengurangi kesengsaraan.[29] Orang mulai dari masalah yang dirumuskan secara cermat, kemudian mencari solusi yang disikapi sebagai solusi tentatif sampai kelemahannya terungkap.[30] Dengan cara itu, solusi yang ditawarkan akan mengalami perbaikan terus-menerus. Dalam konteks sosial-politik, solusi itulah yang kita sebut "kebijakan". Masalahnya, pendekatan yang disebut Magee sebagai "metodologi reformasi" dan "metodologi bagi demokrasi" ini,[31] bukan hanya mengandaikan sikap kritis warga untuk menemukan kelemahan kebijakan pemerintah. Pendekatan itu mengandaikan kejujuran penguasa untuk mengakui bahwa keputusannya bisa salah. Tujuan "rekayasa sedikit-sedikit" untuk mengurangi penderitaan dan bukannya menciptakan kebaikan atau kesejahteraan terbanyak tentu terdengar kurang memuaskan bagi para aktivis politik.

Keempat, masyarakat terbuka tidak terbentuk melulu dari perbaikan institusi, penyusunan konstitusi, perbaikan kebijakan, dan penataan birokrasi. Semua langkah itu memang perlu, tetapi tidak memadai. Kita menyaksikan bagaimana reformasi yang diciutkan ke langkah-langkah itu ternyata menghasilkan istana megah dengan kelakuan penghuninya yang tidak berubah. Kemegahan istana beralih menjadi sarang operasi tukar tambah tempat kebaikan bersama, stabilitas, dan pembangunan diputar balik dengan cara-cara manipulatif. Gerak menuju masyarakat terbuka menuntut perubahan kerangka epistemologi dan perubahan sudut pandang moral.[32] Dengan kata lain, perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan sosial menyangkut cara pandang, cara berpikir, cara merasakan dan menangani masalah, serta cara mengambil keputusan dan cara bertindak. Tanpa mengubah cara pandang, walaupun kita punya undang-undang pengadilan HAM *ad hoc*, para pelanggar HAM tidak akan pernah diadili dan bahkan "naik" menjadi pimpinan partai politik.

Kelima, ketimbang membayangkan situasi utopis yang tidak terjangkau, Popper menganjurkan kita mulai dari realitas sosial di sekitar. Anjuran yang terdengar klise ini sebetulnya merupakan ajakan cermat agar kita tidak menganggap enteng setiap masalah, sekalipun terlihat sepele. Kita tidak pernah mengerti seberapa serius sebuah problem sampai kita mencoba menyelesaikannya dan gagal.[33] Tesis sederhana ini terdengar gamblang bagi orang yang terbiasa dengan cara pikir ilmiah, tetapi ganjil bagi para politisi. Alih-alih memulai langkah pembuatan kebijakan dengan menyelidiki persoalan secara rinci dan mendalam, kebanyakan politisi justru memilih melakukan studi banding sebagai topeng untuk berbelanja dan plesir.

Keenam, sesudah semua jerih payah kita kerahkan, selalu akan ada kesalahan. Mengapa?

---

[29] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. II, hal. 158.

[30] Pokok ini merujuk ke epistemologi Popper yang menolak induksi atau langkah pembuktian kebenaran sebuah pernyataan ilmiah melalui rumusan PP1 (problem praktis) ® TS (teori sementara) ® EE (eliminasi *error*) ® P2 (problem praktis baru). Dengan kata lain, "sains mulai dari problem dan berakhir dengan problem"; lihat, Karl Popper, *Unended Quest* (London: Routledge, 1992), hal. 152-153; juga Karl Popper, *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge* (London: Routledge and Kegan Paul, 1963), terutama Bab 10, bandingkan dengan Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (London: Routledge, 1959), hal 438.

[31] Lihat Bryan Magee, "What Use is Popper to A Practical Politician?" dalam Javier dan Pralong, *Popper's Open Society...*, hal. 150. Untuk rincian tentang bagaimana menerapkan konsepsi Popper ke kawasan politik praktis; lihat, Fred Eidlin, "Matching Popperian Theory to Practice" dalam Javier dan Pralong, *After 50 Years*, hal. 203 *et seqq.*

[32] Popper, *The Open Society and its Enemies*, Vol. II, hal. 232.

[33] Pernyataan Popper seperti dikutip Fred Eidlin, "Matching Popperian Theory to Practice" dalam Javier dan Pralong, *Popper's Open Society...*, hal. 203.

Popper menjelaskannya pada aras metodologis. Kemungkinan untuk bisa salah terkait dengan problem induksi bahwa tidak pernah ada cukup bukti untuk meneguhkan kebenaran sebuah pernyataan. Tidak ada kepastian mutlak bagi pengetahuan. Pada aras antropologis, dalam dunia tindakan manusia, jawaban yang lebih memadai kita peroleh dari Hannah Arendt. Kita selalu bisa mengharapkan hal-hal tak terduga dari manusia. Kita tidak pernah bisa memastikan masa depan kita sendiri. Itulah kondisi sebagai manusia. "Tak ada rekayasa sosial yang sanggup melenyapkan corak ketakterdugaan tindakan manusia".[34]

Bahwa tindakan tidak selalu bisa diramalkan sekaligus memperlihatkan bahwa nalar punya batas. Popper mencoba meyakinkan kita tentang daya-daya nalar. Kecuali kita masing-masing mencoba hidup dengan bernalar, kita tidak mungkin membangun masyarakat demokratis yang kita cita-citakan. Nalar memang bisa membantu manusia dalam mengenali bermacam motif yang memicunya untuk bertindak. Akan tetapi, memilih di antara peringkat-peringkat motif berada di luar batas nalar.[35] Itulah arena pertarungan abadi antara nalar dan hasrat – adonan antara naluri dan emosi.[36]

Jauh sebelum Bergson mengemukakan hal itu, David Hume, filsuf yang banyak memengaruhi Popper, menulis sebuah risalah tentang kodrat manusia. Hume menegaskan bahwa, "nalar saja tidak akan pernah bisa menjadi motif bagi tindakan atau memicu kehendak ... nalar adalah dan mestinya hanya menjadi budak hasrat".[37] Inilah barangkali fakta mencemaskan di bilik terdalam batin manusia; daya irasional secara sembunyi-sembunyi selalu mencari jalan untuk memuaskan hasrat. Boleh jadi Bergson benar bahwa masyarakat terbuka lebih dari sekadar nalar kritis dan kebebasan berpendapat.

Kemungkinan Indonesia

Sejarah terus bergerak dan kita mencita-citakan pembentukan masyarakat Indonesia yang toleran dan terbuka. Dalam gerak itulah kejelian merumuskan masalah menjadi prasyarat untuk menemukan panduan yang bisa mengarahkan kita semakin dekat ke cita-cita. Inilah kondisi yang hendak dilawan Popper ketika menulis *The Open Society*. Itulah kondisi tempat para ultraliberal, dan Popper menjadi salah satu bagiannya (*Mont Pelerine Society*), menyebutnya sebagai kolektivisme.[38] Ada bahaya seandainya kita ingin belajar dari Popper karena kita membaca kondisi seperti itu. Hal yang lebih masuk akal, kondisi di Indonesia lebih mirip hasil proyek politik para ultraliberal yang agenda politik dan ekonominya menghasilkan seluruh privatisasi dan atomisme,[39] serta bermuara pada apa yang sekarang dikenal sebagai "fundamentalisme pasar".

Dengan kata lain, kondisi yang menjerat kita bukan kolektivisme. Kondisi kita adalah sebuah kondisi ultraliberal atomis dan atomistik yang sesekali ditabrak oleh kekuatan-kekuatan tribal sektarian dalam bentuk sektarianisme agama,

---

[34] Hannah Arendt, *Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought* (New York: Penguin Books: 1961/1993), hal. 60-61.

[35] Donald B Calne, *Within Reason, Rationality and Human Behaviour* (New York: Vintage, 1999), hal. 422-423.

[36] Calne, *Within Reason...*, hal. 398.

[37] David Hume, *A Treatise on Human Nature* (England: Hammondsworth, 1739/1987), hal. 297.

[38] Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr B Herry Priyono yang banyak membantu saya melihat kaitan ini dan membaca draf tulisan ini serta mengusulkan beberapa pertimbangan.

[39] Untuk berbagai kritik terhadap gagasan masyarakat terbuka; lihat, antara lain, Willmoore Kendall, "The 'Open Society' and Its Fallacies", dalam *The American Political Science Review*, Vol. 54, No. 4 (Desember 1960), hal. 972-979; Richard Robinson, "Dr. Popper's Defense of Democracy", dalam *The Philosophical Review*, Vol. 60, No. 4 (Oktober 1951), hal. 487-507; Bruce J Caldwell, "Clarifying Popper", dalam *Journal of Economic Literature*, Vol. 29, No. 1 (Maret 1991), hal. 1-33.

etnis, dan sebagainya. Pemikir sosial Perancis Alain Touraine menggambarkan kondisi itu dengan bagus,[40]

> Dulu, bagi kita, masyarakat modern adalah individu-individu yang dihargai karena karya serta prestasi, dan bukan karena ras, keyakinan personal atau jender. Alasan mengapa kita sekarang menyaksikan '*being*' (politik sektarian, **pen.**) melakukan amuk pada '*doing*' (politik pasar, **pen.**) ... etnisitas, nasion dan jender itu adalah karena demodernisasi melenyapkan kaitan individu dengan kewarganegaraannya, dengan profesinya, bahkan dengan standar hidupnya.

Inilah tantangan terbesar keindonesiaan: bisakah kita hidup bersama di bawah suasana sejarah yang siap membawa kita kembali ke tribalisme politik sektarian sekaligus membenturkan kita pada ekstremisme pasar bebas? Keduanya sama-sama menjerumuskan kita ke dalam totalitarianisme, yang pertama melalui keberingasan sektarian sedangkan yang kedua melalui keganasan anarki uang.

Masyarakat terbuka adalah gerak pencarian. Beberapa kali kita tergelincir dalam derap mengejar Indonesia yang bermetamorfosis tanpa henti. Itu bukan karena kita melaju terlalu kencang, tetapi karena kita salah menafsirkan gejala. Kali ini, jangan-jangan kita tersandung karena kita mau melompat jauh ke depan dan terpesona dengan istilah masyarakat terbuka, tetapi salah mendiagnosis masalah dengan menamakan kondisi kita ini sebagai kolektivisme. Dengan kesalahan kategoris ini, kaum ultraliberal justru akan memulai pestaporanya. •

[40] Alain Touraine, *Can We Live Together?* (Stanford: Stanford University Press, 2000), hal. 31.